

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdurrahman, 1980, *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V*, Bandung, Percetakan Offset Alumni.
- Atmosudirjo, S. Prajudi 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dkk, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Yogyakarta, Padiva Buku.
- Ganjang, , 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- H.D van Wijk/Willem Konijnennbelt, 1995, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Ultgeverij Lemma BV, Utrecht,
- H.R, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- H.R, Ridwan, S.F Marbun, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Hadjon, Philipus M, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hutagalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Marbun, S.F 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta.
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Mitra Ahmad,
- Salindeho, John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Grafindo Media Pratama,
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, Tedi, Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemeirntahan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Alurni.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Undang-Undang**

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tantang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

### **Jurnal**

- Hadi, Sofyan, Tomi Michael, “Prinsip Keabsahan *Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No.2, (2017).
- Lova, Evi Fajriantina. Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero). *Jurnal*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2016).
- Nurlinda, Ida, “Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Makalah Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya

Rokhim, Abdul, Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*welfare state*), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, Vol XIX, No 36, Malang: FH Unisma Malang, (2013).

Santoso, Urip, “Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal MAGISTER HUKUM*, Vol 5 No. 1, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, April (2014).

### **Skripsi :**

Imam Budiharto, skripsi: “*Konflik Politik Agraria di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021*”, (Purwokerto, Unsoed, 2022).

### **Internet :**

Agung, Budi, “Disosialisasikan, warga wadas takut terdampak”, *Radar Jogja*, Terahir diakses pada 24 Juni 2021, <https://radarjogja.jawapos.com/breaking-news/2018/03/29/disosialisasikan-warga-wadas-takut-terdampak/>

Ali, Mukti, “Makin Mantap Tolak Penambangan Bumi Wadas, Warga Ancam Demo Lebih Besar”, *Sorot Purworejo*, Terahir diakses pada 5 Juni 2020, <https://purworejo.sorot.co/berita-9203-makin-mantap-tolak-penambangan-bumi-wadas-warga-ancam-demo-lebih-besar.html>.

Heksantoro, Rinto, “Warga Purworejo Demo Tolak Penambangan Batu Untuk Bendungan”, *Detik*, Terahir diakses pada 2 Juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4379101/warga-purworejo-demo-tolak-penambangan-batu-untuk-bendungan>.

Massa GEMPA DEWA Audiensi Dengan BBWS-SO, Sepakati 5 Poin”, *Kumparan*, Terahir diakses pada 2 Juni 2020, <https://kumparan.com/tugujogja/massa-gempa-dewa-audiensi-dengan-bbws-so-sepakat-5-poin-1s7RpVM94X2>.

Nuswantoro, “Bendungan Bener Bakal Jadi Pemasok Air Daerah Jogja”, *Mongabay*, Terahir diakses pada 1 Desember 2019, <https://www.mongabay.co.id/2018/09/25/bendungan-bener-bakal-jadi-pemasok-air-bandara-baru-jogja-bagian-3/>.

Nuswantoro, “Warga Wadas Bertahan, Tolak Penambangan buat Proyek Bendungan Bener”, *Mongabay*, Terahir diakses pada 24 Juni 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/warga-wadas-bertahan-tolak-penambangan-buat-proyek-bendungan-bener/>

Tim Cek Fakta, "CEK FAKTA: Menilik Klaim Mayoritas Warga Desa Wadas Setuju Pembebasan,

Lahan", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/10/101100682/cek-fakta--menilik-klaim-mayoritas-warga-desa-wadas-setuju-pembebasan?page=all#page2>.

